

RINGKASAN

Putri Saqinah
220510166

**ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM PENGATURAN
PENGUNAAN TANDA NOMOR KENDARAAN
BERMOTOR ANTAR PROVINSI DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN
(Dr. Mukhlis, S.H., M.H. & Dr. Zainal Abidin, S.H.,
M.Hum.)**

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, munculnya kebijakan daerah yang membatasi penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) antarprovinsi menimbulkan pertanyaan mengenai batas kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengatur penggunaan TNKB tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengatur penggunaan TNKB antar provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang relevan sebagai dasar analisis terhadap permasalahan yang dikaji.

Berdasarkan hasil penelitian, kewenangan atributif atas registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor secara tegas berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, sementara kewenangan Pemerintah Daerah hanya terbatas pada aspek fiskal dan operasional kewilayahan.

Pemerintah Daerah disarankan untuk tidak melakukan pembatasan terhadap kendaraan bermotor berdasarkan asal TNKB, karena kendaraan yang telah memenuhi ketentuan registrasi dan persyaratan yang berlaku dapat beroperasi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan batas kewenangannya dan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pengaturan yang berkaitan dengan TNKB agar kebijakan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kata Kunci :*Kewenangan Pemerintah Daerah, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Antarprovinsi, Perlindungan Hukum*

SUMMARY

Putri Saqinah

220510166

***ANALYSIS OF REGIONAL GOVERNMENT
AUTHORITY IN REGULATING THE USE OF
INTER-PROVINCIAL MOTOR VEHICLE
LICENSE PLATES REVIEWED FROM LAW
NUMBER 22 OF 2009 CONCERNING ROAD
TRAFFIC AND TRANSPORTATION***

**(Dr. Mukhlis, S.H., M.H. & Dr. Zainal Abidin, S.H.,
M.Hum.)**

The authority of Regional Governments in the administration of road traffic and transportation is regulated under Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. However, the emergence of regional policies restricting the use of Motor Vehicle License Plates (TNKB) across provinces raises questions regarding the limits of Regional Government authority in regulating the use of such TNKB. This research aims to identify and analyze the authority of Regional Governments in regulating the use of inter-provincial TNKB based on Law Number 22 of 2009. The research method used is a normative juridical method with a statutory approach and a relevant case approach as the basis for analyzing the issues under study.

Based on the research results, attributive authority over the registration and identification of motor vehicles is expressly held by the Indonesian National Police, while the authority of Regional Governments is limited to fiscal and regional operational aspects..

Based on the results of this research, Regional Governments are advised not to impose restrictions on motor vehicles based on the origin of their Vehicle Registration Plates (TNKB), given that vehicles which have fulfilled the applicable registration requirements are entitled to operate throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. In addition, Regional Governments need to observe the limits of their authority and coordinate with the Indonesian National Police in matters concerning the regulation of TNKB, so that any policies issued do not conflict with the provisions of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation.

Keywords : Regional Government Authority, Motor Vehicle License Plates, Intern-Provincial, Legal Protection